

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Arif Nasution, 2000, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- A. Asri Harahap, 2000, *Pembagian Kekuasaan Pusat dan Daerah; Pengalaman Masa Lalu dan Idaman Masa Depan*, Mandar Maju, Bandung.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Irawan Soedjito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchan, 2000, *Otonomi Daerah dan Ketidakadilan Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Soenarjo, 1985, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Sutrisno Hadi, 1981, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Syaukani HR, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Waskito, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Wahyumedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati; dan

Peraturan Bupati Pati Nomor 511.2/1021/1995 tentang Klasifikasi Pasar Dan Status Pasar Di Kabupaten Pati.